

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1996.
- Bagir Manan, "Memberdayakan Kekuasaan Kehakiman, Makalah Seminar Nasional " Fungsi dan Peranan MA dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Bapenas dan FH Unpad, Bandung 29 April 1998.
- _____, *Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu Pencarian*, Yogyakarta, FUII Press, 2005.
- Barda Nawawi Arief, "Pemberantasan Korupsi Melalui Pengadilan Korupsi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Makalah Semiloka Pembentukan Pengadilan korupsi Sebagai Perwujudan Optimalisasi Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Kerja sama FH Undip dengan Komisi Hukum Nasional, Semarang, 23 Mei 2002.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Fokema Andreae, *Kamus Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983, dalam *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2007.
- Frans Hendra Winanrta, "Upaya Mencegah Judicial Corruption Melalui Eksaminasi, Mungkinkah?" dalam *Eksaminasi Publik, Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Jakarta: ICW, 2003.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- Hasrul Halili, "Urgensi Transformasi Gerakan Anti Mafia Peradilan Sebagai Gerakan Sosial," Makalah pada *Anti Corruption Summit*, Yogyakarta: FH UGM, 11-13 Agustus 2005.

- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lawrence M. Friedman, sebagaimana dikutip dalam majalah *Jurnal Keadilan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2002.
- Mardjono Reksodipetro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan buku kedua*, Jakarta; Lembaga Kriminologi UI, 2002.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Mas Achmad Santosa, "Upaya Pemberantasan Korupsi di Dunia Peradilan Menelaah Gerak Pembaruan di MA dan Kejaksaan," Makalah pada *Anti Corruption Summit*, Yogyakarta: FH UGM, 11-13 Agustus 2005.
- Muhammad Azhar, *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi. 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Oemar Seno Adjie, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945, dalam Benny K. Harman, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Elsam, 1997.
- Putu Wirata Dwikora. *Peradilan Dagelan*, Jakarta: Penerbit Indonesian Corruption Watch, 2003.
- S. Anwary, *Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Jakarta: AMRA, 2003.
- Satjipto Rahardjo, "Memberantas Korupsi Secara Progresif," *Makalah pada Anti Corruption Summit*, Yogyakarta: FH UGM, 11-13 Agustus 2005.
- _____, "Membicarakan Feminist Jurisprudence", Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Pengajar dan Peminat Hukum yang Berperspektif Gender, Semarang, FH Undip, 7-8 September 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007.
- S. R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.

R. Soesilo, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1991.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005.

Taufiqurachman Ruki, "Korupsi di Peradilan Kendala dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi," Makalah pada *Anti Corruption Summit*, Yogyakarta: FH UGM, 11-13 Agustus 2005.

Teten Masduki, *Mengontrol Mafia Peradilan dalam Eksaminasi Publik, Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Jakarta: ICW, 2003, hal. vii.

B. Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 140.

_____. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 134

_____. *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 137.

_____. *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 8.

Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012

C. Internet:

Masyarakat Transparansi Indonesia, <http://www.transparansi.ot.id>.

Upriyadi, "Pengertian Klasifikasi", Melalui <http://ilmu-perpustakaan.blogspot.com/2012/03/pengertian-klasifikasi.html>.